

**PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

ANDIN WIDYATAMA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT**THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL RATIOS ON
HUMAN DEVELOPMENT INDEX**

(Empirical Study On Districts/Cities in Lampung Province)

By

ANDIN WIDYATAMA

This study aims to determine the effect of Local Government Financial Ratios based on The Local Government Financial Reports on Human Development Index (HDI) that became a measure of development achievement based on components quality of life. The local government ratios used in the research are The Ratio Degrees of Decentralization, The Ratio of Local Financial Dependence, The Ratio of Local Financial Independence, The Effectiveness of Local Revenue Ratio and The Effectiveness of Local Tax Ratio. Sampling technique is done by purposive sampling method on Regional/Cities in Province of Lampung under period 2011-2015. Data analysis technique is done by multiple linier regression analysis method using SPSS (Statical Package for Social Science) ver. 21.

The result of this research is The Ratio Degrees of Decentralization, The Ratio of Local Financial Dependence, and The Effectiveness of Local Tax Ratio influence to HDI. While The Ratio of Local Financial Independence and The Effectiveness of Local Revenue Ratio.

Keywords: Human Development Index (HDI), government financial ratios, government financial report

ABSTRAK

**PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

OLEH

ANDIN WIDYATAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi ukuran capaian pembangunan berbasis komponen kualitas hidup. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah. Teknik *sampling* dilakukan dengan metode *purposive sampling* pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu program SPSS (Statistical Package for Social Science) 21.

Hasil dari penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laporan keuangan pemerintah, rasio keuangan pemerintah

**PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

Oleh

ANDIN WIDYATAMA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH RASIO KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi
Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Andin Widyatama**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1111031010**

Program Studi : **Akuntansi**


Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

 **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si.**  **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Akt.**
NIP 19750620 200012 2 001 NIP 19740826 200812 2 002

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**


Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. 

Sekretaris : Ade Widlyanti, S.E., M.S.Ak., Akt. 

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak. 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Hj. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. 

NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 September 2017

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Laporan skripsi dengan judul, "Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 September
2017



Andin Widyatama
NPM 1111031010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 Juli 1993 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Alex Andin Saputra dan Leoni Anita. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) diselesaikan di TK Taruna Jaya Way Halim, Bandar Lampung pada tahun 1999. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Perumnas Way Halim, Bandar Lampung pada tahun 2005. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 19 Bandar Lampung pada tahun 2008, dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, pada tahun 2011.

Selanjutnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2011. Selama menjadi mahasiswa penulis terdaftar sebagai Anggota Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kelompok Studi Pasar Modal (UKMF KSPM).

MOTO

“Birrul walidain”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya”

(QS. Al Isra: 23)

“Life is simple, make choices and don't look back.”
(Han)

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendukung sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan strata 1 di Universitas Lampung. Karya tulis ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi:

Kedua orang tuaku Alm. Papah (Alex Andin Saputra) dan Mamah (Leoni Anita) yang telah membesarkanku dengan seluruh curahan kasih sayang untuk semua hal dalam kehidupan bersama adikku (Tiara Nurul Janah) dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan do'a, perhatian, motivasi dan dukungan hingga saat ini.

Seluruh sahabat dan teman-temanku di FEB UNILA yang telah memberikan semangat, dan pelajaran yang berharga dalam upaya menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga dan bangsa.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang tak lain hanya atas rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiri pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Terselesainya skripsi ini tak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S. E., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayunu, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S. Ak., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Akademik selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi penulis selama menempuh program pendidikan S1.
8. Karyawan dan karyawan/i jurusan S1 Akuntansi yang banyak membantu dalam kelancaran perkuliahan, Bang Veri, Mbak Tina, Pak Sobari, Mbak Diana, Mpok, Mas Yana, Mas Yogi dan Mas Nanang.
9. Kedua orang tuaku Alm. Alex Andin Saputra dan Leoni Anita serta adikku Tiara Nurul Janah yang selalu menyayangiku dengan penuh ikhlas dan tak akan mampu sebagai anak dan kakak membalasnya dengan materi semata.
10. Nenek dan kakekku tersayang, Alm. Ibu Djuwita Wati dan Bapak R.M Ansori, yang selalu menyayangi dan mendoakan untuk keberhasilan dan kelancaran cucunya, serta memberikan perhatian dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dengan baik

11. Paman-paman, bibi-bibi dan adik-adik ku, Alak, Bunda, Om, Tante, Bebeh, Memeh, Uni, Cece, Kakak, Koko, Abang yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat untuk pantang menyerah dan terus optimis untuk menyelesaikan kuliah dan dalam hal apapun.
12. Keluarga Nekngah dan Abi, Uni, Aa, Uda, Tete, Nangdia, Badindin, Kakak Ay, dan Jibun yang memberikan doa, semangat dan dukungan.
13. Sahabat-sahabat ku Imam Dwi Prasetyo, Veriza Nanda F, dan M. Kurniawansyah yang ada di kala senang maupun susah, menjadi tempat *sharing* penting gak penting soal apapun dan selalu membantu di kala dibutuhkan.
14. Kance-kance ku di Makel yang menjadi teman seperjuangan di Akuntansi Unila 2011, Restu, Yoga, Yogi, Alif, Fajar, Juna, Baharudin, Bily, Ucok, Boga, Mamat, Dion, Tito, Kueng, Vito, Rido.
15. Sahabat-sahabat ku Beben, Ucup, Martin, Okus, Dodo, Mpeb, Amy, Mayang, Ade yang sudah menjadi sahabat sejak SMA.
16. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2011 dan pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Bandar Lampung, 18 September 2017

Penulis,

Andin Widyatama

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Otonomi Daerah	11

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.3 Rasio-Rasio Keuangan Daerah	14
2.1.4 Sistem Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.....	17
2.1.5 Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	18
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
2.3.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	22
2.3.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	23
2.3.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	24
2.3.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	25
2.3.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	26
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel.....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data	33
3.4 Metode Analisis Data.....	33
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	34
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	36
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data	39
-------------------------	----

4.2 Hasil Analisis	39
4.2.1 Statistik Deskriptif	39
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	41
4.2.2.1 Uji Normalitas	42
4.2.2.2 Uji Multikolinieritas	43
4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas	44
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	45
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	46
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi.....	47
4.2.3.2 Uji Signifikansi t.....	48
4.2.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	49
4.3 Pembahasan	50
4.3.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap IPM	50
4.3.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap IPM.....	51
4.3.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap IPM.....	52
4.3.4 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap IPM.....	53
4.3.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap IPM	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Keterbatasan dan Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi 2011-2015	22
1.2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	23
4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	40
4.2 Hasil Uji Normalitas	42
4.3 Hasil Uji Multikolinieritas.....	44
4.4 Hasil Uji Autokorelasi	46
4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	47
4.6 Hasil Uji Signifikansi t.....	48
4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	27
4.1 <i>Normal Probability Plot</i>	43
4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2011-2015
- Lampiran 2 Hasil Perhitungan Rasio-rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2011-2015
- Lampiran 3 Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Koefisien Determinasi, Uji Signifikansi t, Uji , Uji Analisis Regresi Linier Berganda
- Lampiran 4 Gambar *Normal Probability Plot* dan Hasil Uji Heterokedastisitas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi percepatan pembangunan perekonomian di Indonesia dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat yang sentralistik menjadi desentralistik kepada pemerintah daerah yang bertujuan agar setiap daerah yang ada di Indonesia dapat mengoptimalkan pembangunan daerahnya masing-masing.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Otonomi daerah sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan pembangunan daerah di berbagai aspek. Pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Menurut Astri dkk. (2013), peningkatan kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan pelayanan publik yang menjadi tugas pokok pemerintah daerah.

Pemerintah daerah akan membiayai pengeluaran untuk pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan lainnya melalui penerimaan daerahnya, sehingga pengeluaran publik suatu daerah pada era otonomi daerah bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain. Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah.

Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Dengan kata lain kesejahteraan masyarakat akan meningkat ketika pemerintah daerah telah memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat.

Otonomi daerah tidak hanya memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait pembangunan, tetapi juga memberikan wewenang terkait dengan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengolah keuangan daerahnya sehingga terkelola dengan optimal yang berdampak pada peningkatan kemandirian keuangan daerah (Dewi, 2014).

Kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah

adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2007). Beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah (Mahmudi, 2007).

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, keterbatasan data tertentu sehingga populasi yang digunakan adalah pemerintah provinsi (Anggraini, 2015).

Pendapatan yang optimal akan bermuara pada pembangunan yang efektif dan efisien dalam segala bidang, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam Katalog BPS memaparkan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia disuatu wilayah melalui penyediaan layanan publik yang baik adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Dengan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini digambarkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur yang panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai perwujudan dari pembangunan manusia yang dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan.

Tabel 1.1 IPM menurut Provinsi 2011-2015

Provinsi	IPM				
	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45
Sumatera Utara	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51
Sumatera Barat	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98
Riau	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84
Jambi	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89
Sumatera Selatan	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46
Bengkulu	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59
Lampung	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95
Kep. Bangka Belitung	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05
Kep. Riau	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75
DKI Jakarta	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99
Jawa Barat	66.67	67.32	68.25	68.8	69.05
Jawa Tengah	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49
DI Yogyakarta	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59
Jawa Timur	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95
Banten	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27
Bali	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27
Nusa Tenggara Barat	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19
Nusa Tenggara Timur	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67
Kalimantan Barat	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59
Kalimantan Tengah	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53
Kalimantan Selatan	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38
Kalimantan Timur	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17
Kalimantan Utara	-	-	67.99	68.64	68.76
Sulawesi Utara	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39
Sulawesi Tengah	64.27	65	65.79	66.43	66.76
Sulawesi Selatan	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15
Sulawesi Tenggara	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75
Gorontalo	63.48	64.16	64.7	65.17	65.86
Sulawesi Barat	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96
Maluku	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05
Maluku Utara	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91
Papua Barat	59.9	60.3	60.91	61.28	61.73
Papua	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25
Indonesia	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55

Sumber: <https://www.bps.go.id>

Peningkatan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berbeda-beda di setiap wilayah. Seperti halnya di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan IPM yang berbeda di dua bagian wilayahnya,

dimana pembangunan manusia di wilayah barat lebih pesat dibandingkan dengan pembangunan manusia di wilayah timur Indonesia. Salah satu contoh wilayah barat Indonesia adalah pulau Sumatera.

Perkembangan IPM pemerintah provinsi yang ada di Provinsi Lampung memperlihatkan *trend* pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan. Tingkat IPM yang lebih variatif terdapat dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, oleh karena itu penulis mengambil sampel untuk penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2011-2015

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	61,92	62,51	63,21	63,54	64,54
Tanggamus	60,63	61,14	61,89	62,67	63,66
Lampung Selatan	61,95	62,68	63,35	63,75	65,22
Lampung Timur	64,10	65,10	66,07	66,42	67,10
Lampung Tengah	64,71	65,60	66,57	67,07	67,61
Lampung Utara	62,67	62,93	64	64,89	65,20
Way Kanan	62,04	62,79	63,92	64,32	65,18
Tulang Bawang	63,67	64,11	64,91	65,83	66,08
Pesawaran	59,44	59,98	60,94	61,70	62,70
Pringsewu	64,86	65,37	66,14	66,58	67,55
Mesuji	57,32	57,67	58,16	58,71	59,79
Tulang Bawang Barat	60,13	60,77	61,46	62,46	63,01
Pesisir Barat	-	-	58,95	59,76	60,15
Bandar Lampung	72,04	72,88	73,93	74,34	74,81
Metro	72,23	72,86	74,27	74,98	75,10
Lampung	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95

Sumber: <https://lampung.bps.go.id>

Berdasarkan pengalaman pembangunan diberbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja

publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah Kabupaten/Kota. Dalam katalog BPS disebutkan bahwa saat ini pemerintah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU), untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (Anggraini, 2015).

Aspek terpenting dalam kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup yang sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. UNDP (*United Nations Development Programme*) telah menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. IPM yang semakin meningkat dapat menggambarkan bahwa layanan publik bagi masyarakat telah memadai.

Namun Mouw (2013) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan, tetapi sampai saat ini intervensi tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masih banyaknya keluhan atas rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mematuhi kebutuhan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil serta kebutuhan dasar masyarakat, belum nyata dilihat dari kinerja birokrasi pemerintah selama ini. Karena jika melihat fenomena dewasa ini masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat, seperti cara kerja pelayanan yang

berbelit-belit, tidak hanya adanya transparansi dan akuntabilitas, terbatasnya fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

Tingkat pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah memiliki andil besar dalam terciptanya pelayanan publik yang optimal diiringi dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga bermuara pada peningkatan pembangunan manusia yang berkesinambungan. Semakin tinggi pendapatan daerah maka akan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini dilihat dari rasio-rasio keuangan daerah antara lain, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengaruh rasio-rasio keuangan daerah terhadap pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu penulis memilih judul “**Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
2. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?

3. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
4. Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?
5. Apakah Rasio Efektivitas Pajak Daerah dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap IPM?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dalam laporan keuangan terhadap IPM.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dalam laporan keuangan terhadap IPM.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam laporan keuangan terhadap IPM
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam laporan keuangan terhadap IPM
5. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah dalam laporan keuangan terhadap IPM

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pembelajaran riil dan merupakan penerapan teori-teori akademis yang telah diperoleh selama studi di perguruan tinggi, sekaligus sebagai tolak ukur pribadi tentang keilmuan yang diterima selama ini, dan sebagai tugas akhir yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana dalam bidang ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Bagi Pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai rasio keuangan apa saja yang secara signifikan dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya (Maimunah, 2006).

Menurut Mardiasmo (2004) secara teoritis otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah.

- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Menurut Oates (1993), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah subnasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik.

Menurut Halim (2007), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah :

- a. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat kemandirian fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai salah satu entitas pelapor setiap periodenya pemerintah daerah juga membuat laporan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Bab I Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

Mamesh mengemukakan (Halim, 2007) keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki Negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Halim (2007) menyatakan keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak untuk memungut pajak, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasai daerah. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.3 Rasio-Rasio Keuangan Daerah

Analisis keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007). Rasio yang digunakan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah antara lain rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD dan rasio efektivitas pajak (Mahmudi, 2007).

2.1.3.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 2004).

2.1.3.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Mahmudi, 2007).

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

2.1.3.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007).

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

semakin tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah.

2.1.3.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2007).

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2007).

2.1.3.5 Rasio Efektivitas Pajak

Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan penerimaan pajak yang ditargetkan.

Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2007).

2.1.4 Sistem Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Menurut Davey (di dalam Adisasmita, 2011), tujuan hubungan antara pusat dan daerah adalah :

- a. Adanya pembagian wewenang yang rasional antar tingkat-tingkat pemerintahan mengenai peningkatan sumber-sumber pendapatan dan penggunaannya
- b. Pemerintah daerah memiliki sumber-sumber dana yang cukup, sehingga dapat menjalankan tugas atau fungsi dengan baik (penyediaan dana untuk menutup kebutuhan rutin dan pembangunan)

- c. Pembagian yang adil antara pembelanjaan daerah yang satu dengan daerah lainnya
- d. Pemerintah daerah dalam mengupayakan pendapatan sesuai dengan pembagian yang adil terhadap keseluruhan beban pengeluaran pemerintah.

2.1.5 Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

Di dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari (Haryanto, 2001) :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Pinjaman daerah.
- d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara pemerintah pusat dengan daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan

keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Dalam konsep pembangunan manusia pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Sebagaimana dari *Human Development Report* (1995), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan;
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Secara umum metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia sama dengan metode penghitungan yang digunakan oleh UNDP. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu:

1. Indeks angka harapan hidup ketika lahir.
2. Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih.
3. Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (*PPP-Purchasing Power Parity*/paritas daya beli dalam rupiah).

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = (X1+X2+X3)/3$$

Dimana:

X1 = Angka harapan hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3= Tingkat kehidupan yang layak

Secara detail, prosedur penghitungan IPM dapat dilihat dalam publikasi Indonesia Laporan Pembangunan Manusia BPS, Bappenas, dan UNDP (2001).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Anggraini (2015)

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini memiliki keterbatasan, keterbatasan data tertentu sehingga populasi yang digunakan adalah pemerintah provinsi.

2. Setyowati dkk. (2012)

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). Dalam penelitian tersebut dikemukakan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut PAD merupakan salah satu komponen dalam menghitung rasio derajat desentralisasi.

3. Yusuf (2014)

Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Eks Karisidenan Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima variabel yang telah diuji dana alokasi umum dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, selain itu

belanja modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota eks karesidenan surakarta.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Mahmudi (2007), Derajat Desentralisasi merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan. Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD.

Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

Setyowati dkk. (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dalam penelitian tersebut PAD merupakan komponen penelitian untuk mengukur rasio derajat desentralisasi.

Anggraini (2015) dalam penelitiannya memberikan simpulan rasio derajat desentralisasi memberikan pengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diberikan.

H1: Rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.2 Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rasio ketergantungan keuangan daerah membandingkan pendapatan transfer dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah. Rasio tersebut ditujukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah kota/provinsi terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2007:128). Apabila pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kondisi keuangan yang baik, sehingga pelaksanaan penyediaan layanan publik dapat terpenuhi dengan baik dan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ardiansyah dkk. (2014) dalam penelitiannya yang menguji apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM, dimana DAU merupakan komponen dari pendapatan transfer. Dalam penelitiannya DAU berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM.

Anggraini (2015) dalam penelitiannya dimana pendapatan transfer tidak akan berpengaruh terhadap pengadaan publik dikarenakan pendapatan transfer digunakan untuk menutup pos belanja operasi yang tidak mampu dipenuhi hanya dengan PAD. Jika pengadaan publik tidak berpengaruh begitu pun dengan IPM. IPM yang diukur dari pengadaan publik juga tidak akan berpengaruh oleh pendapatan transfer. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diberikan.

H2: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada daerahnya. Dengan kata lain rasio ini dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. Kemandirian setiap daerah tentunya berbeda-beda, sesuai dengan sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan daerah. Semakin tinggi rasio tersebut maka pemerintah daerah semakin berpotensi menyediakan layanan publik yang baik sehingga peningkatan IPM dapat tercapai (Mahmudi, 2007).

Amalia dan Purbadharmaja (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Dewi dan Sutrisna (2014) juga mengemukakan hal yang sama dari penelitian yang

dilakukan. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan maka hipotesis yang dapat diberikan.

H3: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.4 Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendapatan pemerintah yang tinggi belum tentu menjadi cerminan dapat terwujudnya pembangun yang baik pada daerahnya. Keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada tingginya pendapatan daerah tetapi pengelolaannya juga menjadi hal penting.

Ardiansyah dkk. (2014) dalam penelitiannya menyebutkan PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Dalam penelitiannya juga Setyowati dkk. (2012) mengemukakan PAD berpengaruh signifikan terhadap PAD. Angka rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya. Pendapatan yang cukup diharapkan dapat digunakan dan dikelola pemerintah daerah dengan baik untuk penyediaan layanan publik. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan maka hipotesis yang diberikan.

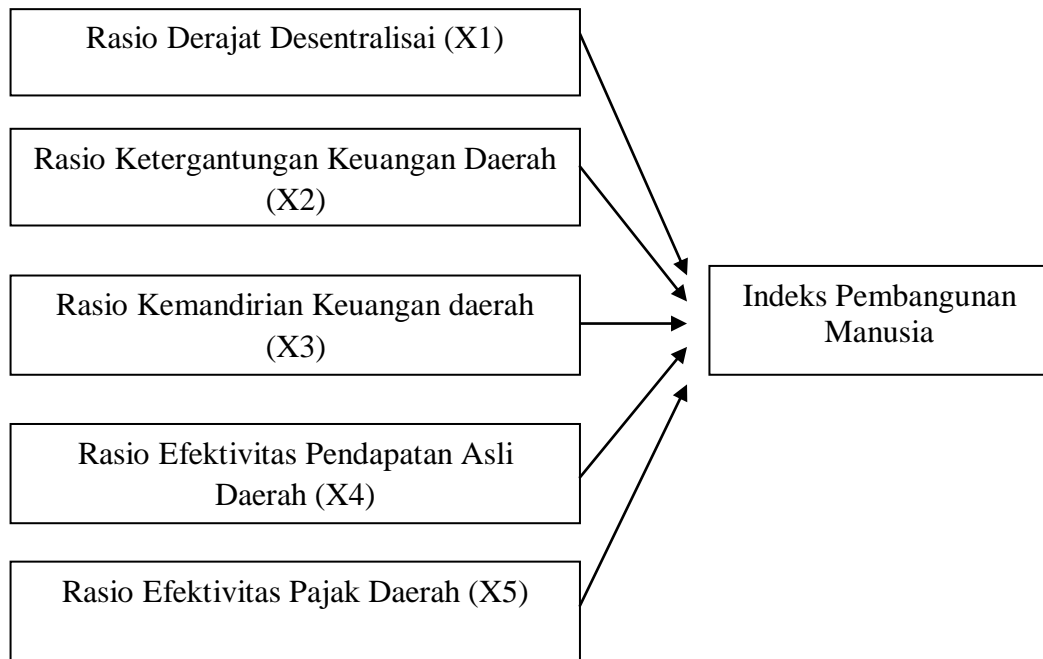
H4: Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.5 Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan. Pengumpulan pajak yang efektif diharapkan dapat menjadikan daerah memiliki pendapatan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan atau mencukupi pembangunan fasilitas publik di daerahnya.

Davoodi dan Zou (1998), mengemukakan *Average Tax Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *Per Capita Output Rate* dimana *Per Capita Output Rate* digunakan sebagai dasar peningkatan *Human Development Index*. Berdasarkan katalog BPS penyediaan layanan publik yang baik diharapkan dapat meningkatkan IPM sebagai salah satu tolak ukur kinerja pemerintah di daerah. Hal ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan turut serta dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan maka hipotesis yang dapat diberikan.

H5: Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Gambar 1. Kerangka Pikir Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap IPM

III. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel merupakan suatu objek yang diteliti atau menjadi fokus perhatian dalam sebuah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio-rasio keuangan daerah meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio efektivitas pajak daerah. Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya variabel yang terikat. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah rasio-rasio Keuangan Daerah sebagai berikut :

3.1.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Mengukur derajat otonomi fiskal berdasarkan persentasi perbandingan PAD terhadap total pendapatan daerah (Munir dkk., 2004). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.1.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah (Mahmudi, 2007).

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi .

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.1.1.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya, Mahmudi (2007).

Menurut Halim (2007), rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{transfer provinsi}} \times 100\%$$

3.1.1.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang

tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2007).

Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2007).

$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
--

3.1.1.5 Rasio Efektivitas Pajak

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan penerimaan pajak yang ditargetkan. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2007).

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya atau disebut Otonomi Daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pembangunan lebih berhasil. Sehingga salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihipotesiskan akan meningkat pula.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder pada tahun 2011-2015 yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut :

IPM : Badan Pusat Statistik (BPS)

LKPD : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui dokumen tertulis, terutama berupa arsip dan juga termasuk buku-buku tertentu, pendapat dan teori serta data-data dari dinas terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperlukan adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2011-2015.

3.3 Sampel dan Teknik Sampling

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada tahun 2011-2015. Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria pemilihan sampel yaitu:

- Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015.
- Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015 yang menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan di audit.
- Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015 yang mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Pemerintah kabupaten/kota se-Lampung tahun 2011-2015 yang menyajikan data keuangan untuk digunakan dalam perhitungan rasio.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi yaitu dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 2006). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari mean, median, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum dari data sampel.

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran distribusi dan perilaku data sampel penelitian tersebut.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Model analisis regresi berganda dapat dijadikan sebagai alat estimasi jika asumsi model regresi berganda tersebut merupakan model regresi yang dihasilkan estimator linier yang tidak bias (*Best Linier Unbiased Estimator/ BLUE*), yaitu data yang terdistribusi dengan normal, tidak terdapat multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah persyaratan *BLUE* ini terpenuhi atau tidak dapat diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menguji *Kolmogorov-Smirnov* dengan tingkat signifikansi 0,05.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Bila *Asymp. Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang *perfect* atau *exact* diantara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bias terdeteksi keberadaannya bila R^2 dari *auxiliary regression* melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu, pengujian ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedastisitas muncul apabila nilai varian dari variabel tidak bebas

(Y_i) meningkat sebagaimana meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka variabel Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data *cross section* daripada *timeseries*. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik *saccater plot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Model regresi dikatakan heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.4.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *timeseries*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi lebih sering terjadi pada data *time series*. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi maka dalam penelitian ini digunakan *Runs Test* (Ghozali, 2013).

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh Rasio-rasio Keuangan Daerah Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software SPSS (Statistical*

Package for the Social Science) dan *Microsoft Office Excel*. Terdapat dua persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 β_0 = Konstanta
 X1 = Rasio Derajat Desentralisasi
 X2 = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
 X3 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 X4 = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
 X5 = Rasio Efektivitas Pajak Daerah
 e = *error term*

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menggambarkan seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

3.4.4.2 Uji Signifikansi t

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel dependen yang dilakukan menggunakan uji signifikansi

parameter individual pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan analisis 5% .

Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika $\text{Sig} \leq 0.05$ maka : H_a diterima

Jika $\text{Sig} \geq 0.05$ maka : H_a ditolak

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Rasio Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Indonesia (IPM), rasio derajat desentralisasi sangat berperan penting dalam mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia terutama di wilayah-wilayah kabupaten/kota yang ada di Lampung. Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah dinilai memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer maka pemerintah daerah akan sangat terpengaruh dengan pendapatan transfer untuk membiayai pengeluarannya termasuk dalam penyediaan pelayanan publik untuk meningkatkan IPM. Dari data yang diperoleh variabel rasio kemandirian keuangan daerah dan efektifitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu untuk variabel rasio efektifitas pajak memiliki hasil berpengaruh negatif signifikan, hasil uji statistik tidak mendukung hipotesis awal dimana rasio tersebut memiliki pengaruh positif. Pengumpulan pajak yang efektif tidak dapat menjadi cerminan

kondisi perekonomian masyarakat dan akan terealisasinya pembangunan yang dapat mensejahterakan masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, berkaitan dengan peraturan dimana pajak merupakan iuran wajib dan dipaksakan, serta pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari pajak.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Adapun saran-saran dan keterbatasan yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai sampel penelitian dan menggunakan tahun 2011-2015. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak sampel pemerintah daerah sehingga hasil penelitian dapat menunjukkan data yang lebih signifikan.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya bisa menjelaskan 49% variabel dependen. Sehingga sisanya sebanyak 51% dapat dijelaskan dengan variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian seperti Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada data yang digunakan dimana data yang digunakan sudah jadi, dan dari data yang digunakan pada variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memiliki standar deviasi 0,05627385 yang nilainya mendekati nilai meannya 0,0556158.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu, Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Amalia, F.R. dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 3, No. 6
- Amani, Siti Noor dan Ni Made Inna Dariwardani. 2009. Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah. www.artikel.com
- Anggraini, Tika. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18*.
- Ardiansyah, Vitalis Ari dan Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi 17*.
- Astri, Meylina. Nikensari, S.I. dan Kuncara, Harya. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Bisnis* Vol 1, No.1.UNJ. Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung
- Badan Pusat Statistik. Katalog BPS: 4102002. *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS Jakarta-Indonesia

Badrudin, Rudy. 2011. *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Buletin Ekonomi

Bisma, I Dewa Gede dan Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.

Darumurti, K.D dan Rauta, Umbu, 2003, *Otonomi Daerah, Kemarin, Hari ini, dan Esok, Kritis*, Vol. XII, No. 3, 1 - 53.

Davoodi, H dan Zou, H.F. 1998. Fiscal Decentralization an Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economic*, 43: 244-257

Dewi, P.A.K dan I Ketut Sutrisna. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 1.

Ghozali, Imam. 2013." *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*". Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Haryanto, Joko Tri. 2001, *Potret PAD dan Relevansinya terhadap Kemandirian Daerah*, Jakarta.

<https://lampung.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3: 305-360.

Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pemngambilan Keputusan*

- Ekonomi, Sosial dan Politik. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN.
- Maimunah, Mutiara, 2006, *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Simposium Nasional Akuntansi 9*.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Munir, H. Dasril dkk., 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Mouw, Erland. 2013. Kualitas Pelayanan Publik di Daerah. *E-Jurnal UNIERA Volume 2 Nomor 2*; ISSN 2086-0404.
- Oates, W, 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, XLVI. 237-243.
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave. 1980. *Public Finance in theory and Practice*, edisi ke-3. Tokyo: McGraw Hill International Book Company.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi* Vol. 9 No. 1.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta, 13 Maret 2002.

- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daeah* Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sumardjoko, Imam. 2014. Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal Sebagai Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi 17*.
- Todaro, M.P dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan*. Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Widodo, Adi. Waridin. dan Maria, Johanna. 2001. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*.
- Yusuf, Noor Andi Fakhrudin. 2004. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kpota Eks Karesidenan Surakarta. Universitas Diponogoro Semarang